

Vol. 1, No. 2, Oktober 2004

ISSN 1829-6580

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

INDONESIA DAN HAK ASASI INTERNASIONAL :

Dafri Agussalim

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI LIBYA :

Sejak Perang Teluk II 1993 - 2003

Andi Purwono

KRISIS NUKLIR KOREA UTARA :

Studi Implikasi Pengembangan Nukir Korea Utara
terhadap Perimbangan Kekuatan Militer di
Kawasan Asia Timur

Ismah Tita Ruslin

PILPRES DAN TAUSHYIAH KYAI NU :

Persinggungan NU dan Politik selama Pilpres 2004

Harun Mashuri

DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL :

Konsep Tantangan dan Trend

Zainal Arifien

PARTAI POLITIK :

Suatu Tinjauan Teoritis

Agus Riyanto

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



SPEKTRUM

Vol. 1

No 2

Hal. 1- 63

Semarang
Oktober 2004

ISSN
1829-6580

DAFTAR ISI

Fokus :

- ❑ **INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**
Dafri Agussalim 1-8
- ❑ **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI LIBYA :**
Sejak Perang Teluk II 1991-2003
Andi Purwono 9-18
- ❑ **KRISIS NUKLIR KOREA UTARA :**
Studi Implikasi Pengembangan Nuklir Korea Utara terhadap Perimbangan
Kekuatan Militer di Kawasan Asia Timur
Ismah Tita Ruslin 19-28
- ❑ **PILPRES DAN TAUSHIYAH KYAI NU :**
Persinggungan NU dan Politik selama Pilpres 2004
Harun Mashuri 29-42
- ❑ **DEMOKRASI DI TINGKAT LOKAL :**
Konsep, Tantangan dan Trend
Zaenal Arifien 43-54

Tinjauan Teori :

- ❑ **PARTAI POLITIK :**
Suatu Tinjauan Teoritis
Agus Riyanto 55-60

Pustaka :

- ❑ **BISNIS MILITER NEGARA DUNIA KETIGA :**
Upaya Mempertahankan Eksistensi dan Legitimasi Militer
Ismiyatun 61-63

PARTAI POLITIK : SUATU TINJAUAN TEORITIS

Agus Riyanto

Ketua Program Studi Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstract

This article described political party theorizing that were early history of development, function, and typology of political parties. The existence of political party was central phenomena on political way of the state.

Political party could push the state to more democratic or vis a vis authoritarian. That condition was influenced by internal condition, party system and ideological distance between political parties, whether centripetal or centrifugal types.

Key Words : *political party, power, people, articulation*

A. PENDAHULUAN

Dalam wacana politik modern, partai politik merupakan lembaga politik yang sangat sentral dan memberi warna perpolitikan suatu negara. Partai politik menjadi salah satu indikator utama untuk menilai tingkat demokratis suatu negara. Konstelasi politik suatu negara juga sangat ditentukan oleh sejauh mana peran dan eksistensi partai politik yang ada di dalamnya.

Secara ideal, partai politik dibentuk untuk "menjembatani" kepentingan rakyat dengan penguasa (pemerintah) melalui wakil-wakilnya yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum, dengan mengartikulasikan dan mengagregasikan serta mengontrol jalannya kekuasaan. Dengan demikian, maka kekuasaan pemerintah dijalankan demi kepentingan kesejahteraan rakyat dan bukan kepentingan sekeompok orang *an-sich*.

Namun ada kecenderungan, khususnya di negara-negara yang kurang demokratis, partai politik justru berfungsi sebagai alat legitimasi kepentingan penguasa. Partai politik hanya sebagai alat memobilisasi bahkan mengontrol rakyat untuk kepentingan penguasa, serta alat untuk memper-

oleh dan mempertahankan kekuasaan.

Tulisan singkat ini akan mencoba menelusuri partai politik secara teoritis, sejarah asal mula perkembangan partai politik, fungsi-fungsi partai politik, maupun tipe-tipe partai politik.

B. SEJARAH ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK

Partai politik berasal dari kata partai yang diambil dari Bahasa Latin, *partire*, yang bermakna membagi dan merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi yang lebih tua usianya. Faksi berasal dalam bahasa latin, *facere*, yaitu bertindak atau berbuat. Dalam pengertian politik faksi adalah kelompok yang melakukan tindakan-tindakan merusak, sehingga awalnya faksi selalu diperepsikan negatif dan dikaitkan dengan perilaku merusak, kejam, dan bengis.¹

Dalam tradisi politik Eropa, faksi dikenali sebagai organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Peralihan pemerintahan kuno dari satu pengu-

¹ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan : Partai Politik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996, hal. 1

asa ke penguasa lainnya biasanya didukung oleh faksi yang bekerja untuk mendominasi seluruh kerajaan. Hal ini lah yang membawa pandangan negatif terhadap faksi dan berimplikasi sulitnya pengakuan masyarakat terhadap partai karena kaitannya dengan faksi, meskipun Voltaire pada abad ke-18 mencoba meyakinkan masyarakat Eropa bahwa partai bukanlah faksi.²

Namun demikian, sulit untuk menentukan titik waktu yang tepat bagi kelahiran partai politik. Pada abad ke-18 dan 19, partai politik lebih dikenal sebagai '*partai notables*', yaitu komite pemilu yang relatif kecil dan terdiri dari individu-individu yang mempunyai prestise, privilese dan kekayaan di daerah mereka. Partai politik berkembang menjadi organisasi yang lebih permanen dan berskala nasional seiring pertumbuhan kekuasaan yang dipilih majelis tersebut.³ Pada dasarnya, kelahiran partai-partai politik dipicu oleh meluasnya kesadaran bahwa rakyat merupakan faktor harus yang diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik.

Ramlan Surbakti mencatat tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik⁴. *Pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada korelasi antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Teori ini mengatakan partai politik dibentuk kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai lain yang dibentuk masyarakat yang tidak puas dengan partai politik yang dibentuk parlemen (pemerintah). Kondisi demikian tidak hanya dapat ditemui wi-

layah atau bangsa yang tengah dijajah sebagai alat memobilisasi massa tetapi juga di negara Barat seperti Partai Buruh di Inggris dan Australia, partai Hijau di Jerman.

Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai respon politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan akibat perubahan masyarakat secara luas, yaitu legitimasi, integrasi, partisipasi. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, masalah dalam identitas bangsa, dan munculnya tuntutan dalam proses politik. Dan pada akhirnya kemudian membentuk partai politik dalam upaya menuntut dan memperjuangkan hak-hak tersebut.

Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi media massa dan transportasi, pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, birokratisasi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan untuk melahirkan suatu organisasi politik.

Sementara Roy C. Macridis mengamati pertumbuhan partai politik dalam lima tahap⁵. *Tahap awal*, pertumbuhan partai pada umumnya terjadi setelah adanya pemerintahan perwakilan (parlementer). Pada awal abad 19 partai muncul sebagai kelompok yang terdiri dari anggota-anggota dewan perwakilan. Nama ideologi sering dikaitkan dengan nama partai tertentu, seperti liberal dan konservatif, republik dan demokrat, legitimis, bonapartis, dan sebagainya. Semua partai dan pandangan pimpinan partai pada tahap ini dijiwai ideologi liberalisme.

Tahap kedua, perkembangan partai politik muncul setelah pertengahan abad ke-19. Terjadinya perlu-

² Ibid, hal.1

³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 82.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 113.

⁵ Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Partai Politik*, PT Tiara Wacana Yogya, 1988, hal. 17

asan daerah lingkup pemilihan di Amerika sekitar pertengahan tahun 1830-an, dan antara 1848-1870, juga di Jerman dan di negara-negara Eropa Barat lainnya. Pada mulanya, hal tersebut tidak mengubah karakter partai melainkan hanya memberikan kondisi untuk berubah. Kepemimpinan yang menjadi elemen dasar partai tetap pada wakil-wakil di parlemen. Tapi pada periode ini dukungan harus berasal dari pendukung yang lebih luas sehingga menyebabkan adanya perubahan bertahap dalam organisasi partai. Salah satunya ialah perkembangan organisasi di pusat yang permanen untuk mengumpulkan suara, mengumpulkan dana, mengajukan program, dan menetapkan kepemimpinan partai baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama-tama di Amerika Serikat dan tahun 1870 di Inggris serta di Eropa Barat, partai menjadi organisasi besar yang menyerupai piramid yang puncaknya ialah anggota parlemen sedangkan dasarnya mencakup sebagian besar masyarakat. Pada abad 19 ini isu-isu seperti pemilihan umum, kebebasan, berorganisasi, hubungan antara gereja dan negara, dan perkembangan instrumen demokrasi telah menjadi isu utama kontroversi dan perdebatan.

Tahap ketiga, terjadi sebelum dan sesudah akhir abad ke-19, yang menurut Maurice Duverger pertumbuhan periode ini terkait dengan apa yang disebut partai-partai di luar parlemen (*extra-parliamentary parties*). Partai tidak tumbuh dari anggota parlemen, tetapi berasal dari orang-orang yang tidak senang terhadap parlemen dan orang-orang yang ingin keluar dari parlemen, dan bahkan ingin menghapuskannya. Keanggotaan partai ditawarkan secara luas, dan setiap anggota membayar iuran, berpartisipasi, bergerak dan aktif. Program partai menjadi spesifik dan diarahkan pada kepincangan-kepincangan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh revolusi industri. Partai muncul sebagai

suatu gerakan yang disiplin dengan suatu visi tertentu dengan dukungan massa, misal partai Sosialis Perancis di bawah Jaure, partai Sosial Demokrat di bawah Bebel, Partai Buruh Inggris di bawah Keir Hardie dan inspirasi kaum Fabian.

Tahap keempat, ditandai dengan kemunculan partai-partai komunis Eropa Barat yang didirikan pasca Perang Dunia I, yang bercirikan, berdisiplin tinggi, komitmen dan loyalitas yang tinggi para anggota secara individual. Mereka diambil dari tempat kerja mereka seperti pabrik, pabrik, pegawai negeri, universitas, sekolah menengah dan juga tempat tinggal kaum buruh. Kemudian mereka membentuk sel-sel yang selalu bertemu dan hanya mengenal pemimpin mereka, dan tidak dengan anggota sederajat dari sel-sel lain.

Perkembangan partai komunis pada juga mendorong proses demokratisasi. Partai-partai sosialis di bawah serangan kaum komunis menjadi makin beradaptasi dengan pemerintahan demokrasi dan parlemen; sebaliknya partai liberal terpaksa harus menarik dukungan massa yang sebelumnya menjadi pendukung kaum sosialis, dan kini secara aktif dan militan dirangkul pihak kaum komunis. Dalam sejumlah sistem politik khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Skandinavia, dan sebagian Perancis serta negara-negara persemakmuran-pertumbuhan partai massa mendorong langkah demokratisasi masyarakat. Tetapi di beberapa, khususnya Jerman dan Italia, potensi partai massa di eksploitasi dengan cara meniru taktik Komunis untuk meruntuhkan pemerintahan demokrasi, dan mendirikan pemerintahan satu partai dengan memusnahkan semua partai lain, dan menjadikan negara sebagai bagian dari partai itu sendiri, seperti partai Nazi dan Fasis di Italia.

Tahap kelima yaitu pasca perang dunia II, semua partai politik di Dunia Barat dan industri maju mulai

menampakan karakter ideologis. Semua partai menjadi perantara (*broker*) dari suatu masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai kelompok profesional, pekerjaan, dan kelompok kepentingan akibat industrialisasi. Oleh karena itu, partai menjadi representatif dan lebih reformis; mereka menangani masalah-masalah *ad-hoc* dan mencari pemecahannya secara *ad-hoc* (pragmatis). Partai-partai tidak lagi berusaha menyelesaikan isu secara revolusioner yang mencakup struktur sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi lebih dengan kompromi dan evolusioner. Ideologi diganti perannya oleh manipulator dan pemimpin visioner diganti oleh wakil-wakil yang kredibel.

C. FUNGSI PARTAI POLITIK

Secara umum fungsi utama partai politik dibentuk untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu melalui pemilihan umum. Namun demikian, partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi lain, yaitu

Pertama, pelaksana sosialisasi politik, yaitu agen pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat.

Kedua, rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Ketiga, wadah partisipasi politik, media aktivitas warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Keempat, pemandu kepentingan, yaitu menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum.

Kelima, komunikasi politik, yaitu penyampai informasi politik a-

tau komunikator politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (sistem politik).

Keenam, pengendalian konflik, merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan solusi.

Ketujuh, kontrol politik, kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

D. TIPOLOGI PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTALAN

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks keberadaan partai politik pun juga beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh misalnya perbedaan asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, serta basis sosial dan tujuan yang menghasilkan tipe dan corak partai politik yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan asas dan orientasinya, terdapat tiga tipe partai politik yaitu partai politik pragmatis, doktriner, dan partai politik kepentingan.⁶ Partai politik pragmatis yaitu partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin tertentu dengan ciri-ciri penampilan partai cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan pemimpin serta terorisir agak longgar.

Partai politik doktriner yaitu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret se-

⁶ Ramlan Surbakti, *opcit*, hal. 122.

bagai penjabaran ideologi sehingga pergantian kepemimpinan tidak mengubah prinsip dan program dasar partai hanya mengubah kepemimpinan pada tingkat tertentu, dan partai terorganisasikan secara ketat contohnya partai komunis.

Partai kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Misal Partai Hijau di Jerman, Partai Buruh di Australia, dan Partai Petani di Swis.

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua yaitu partai massa atau lindungan (*patronage*) ialah dan partai kader⁷. Partai politik massa atau lindungan ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga dapat memenangkan pemilu. Biasanya merupakan gabungan berbagai aliran politik. Contoh Partai Barisan Nasional di Malaysia.

Partai kader ialah partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketekatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama yang diseleksi secara ketat dan hirarkis, contoh partai komunis.

Menurut basis sosialnya ada empat tipe partai yaitu : *pertama*, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan bawah; *kedua*, partai politik yang anggota berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha; *ketiga*, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Hindu, Kristen; *Keempat*, partai politik yang anggota-anggota-

nya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu⁸.

Sementara berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga, *pertama* partai perwakilan kelompok yaitu partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin dalam parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia. *Kedua*, partai pembinaan bangsa yaitu partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura, *Ketiga*, partai mobilisasi yaitu partai yang bertujuan memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan pemimpin partai⁹.

Tabel Karakteristik Parpol

Tipologi	Jenis Partai
Azas dan Orientasi	- Pragmatis - Doktriner - Kepentingan
Komposisi dan Fungsi Anggota	- Massa atau Lingkungan - Kader
Basis Sosial	- Lapisan Sosial - Kelompok Kepentingan
Tujuan	- Perwakilan Kelompok - Persatuan Bangsa - Mobilisasi

Partai politik membentuk pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai yang disebut dengan sistem kepartaian. Berdasarkan jumlah partai sistem kepartaian dapat diklasifikasikan dalam partai tunggal (totaliter, otoriter, dan dominan), sistem dua partai dominan dan kompetitif, dan sistem multi partai¹⁰.

Bentuk partai tunggal totaliter ialah sistem kepartaian yang di dalamnya hanya yang memegang kendali seluruh aspek kehidupan so-

⁷ Ibid, hal. 123

⁸ Ibid, hal. 124

⁹ Ibid, hal. 124

¹⁰ Ibid, hal. 125

sial politik masyarakat. Partai tunggal otoriter ialah sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai tetapi hanya terdapat satu partai dominan yaitu partai penguasa, sementara partai-partai lain dibatasi ruang geraknya. Sedang partai tunggal dominan ialah sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai dominan, sementara partai lain tidak mampu bersaing meskipun terdapat kesempatan untuk berkembang.

Sistem dua partai kompetitif merupakan sistem kepartaian yang terdiri atas dua partai yang bersaing di dalam pemilu. di mana partai pemenang menjadi partai pemerintah sementara yang kalah menjadi menjadi partai oposisi. Sedangkan sistem multi partai merupakan sistem kepartaian yang terdiri lebih dari dua partai dominan, biasanya produk masyarakat majemuk.

Berdasarkan jarak ideologi Giovanni Sartori membagi tiga sistem kepartaian yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrem¹¹. Pluralisme sederhana ialah sistem kepartaian yang bersifat bipolar (dua kutub ideologi), tidak terpolarisasi, dan bersifat sentripetal. Dalam sistem ini partai-partai politik yang ada tidak memiliki perbedaan ideologi (platform) partai yang bersifat diametral dan hanya terdiri dari dua kutub ideologi sehingga tidak terpolarisasi secara tajam, sehingga kemungkinan konflik antar partai kecil, contoh di AS.

Pluralisme moderat ialah sistem kepartaian yang bersifat bipolar, terpolarisasi tetapi kecil, dan bersifat sentripetal. Dalam sistem ini terdiri dari banyak partai dengan beragam ideologi tetapi perbedaan antar ideologi tidak tajam sehingga kemungkinan terjadi konflik kecil, contoh di Belanda.

Sedangkan pluralisme ekstrim ialah sistem kepartaian yang bersifat

multipolar (lebih dari dua kutub ideologi), terpolarisasi, dan bersifat sentrifugal (mengembangkan sistem sendiri). Dalam sistem ini terdiri dari beragam partai dengan beragam ideologi yang sangat tajam perbedaannya sehingga kemungkinan munculnya konflik antar partai sangat besar, contoh di Italia (Indonesiapun bisa dikategorikan kelompok ini).

E. PENUTUP

Keberadaan partai politik merupakan suatu fenomena yang sentral dalam menentukan perpolitikan suatu negara. Partai politik dapat mendorong negara menjadi lebih demokratis atau justru menjadi otoriter. Partai yang mampu berperan baik sebagai "penyambung lidah" aspirasi rakyat akan mendorong proses demokratisasi suatu negara. Sementara partai yang hanya menjadi 'stempel kekuasaan negara' hanya akan menjadikan partai sebagai 'kuda troya' rezim penguasa yang senantiasa digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kondisi tersebut sedikit banyak Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Kondisi internal partai politik yaitu corak dan tipologi serta ideologi partai politik yang ada.
2. Sistem kepartaian yang ada.
3. Jarak ideologis yang ada di antara partai politik apakah bersifat sentrifugal atau sentripetal.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan : Partai Politik*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996.

Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Partai Politik*, PT Tiara Wacana Yogya, 1988

Rafael Raga Maran, *Fengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widia-sarana Indonesia, Jakarta, 1992.

¹¹ Ibid, hal. 127-128